



Industrialisasi: Kemosrotan atau Kebangkitan?

Vol. 41, No. 2, 2022

Prisma diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan ekonomi, perkembangan sosial dan perubahan kultur di Indonesia dan sekitarnya. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, laporan atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. *Redaksi* mengundang para ahli, sarjana, praktisi dan pemuda masyarakat luas. Tulisan dalam Prisma lebih selalu segar atau mencerminkan semangat LP3ES. Redaksi dapat menyuguhkan dan memperhalus tulisan yang dimuat tanpa mengubahi maksud dan isinya. Dilarang mengutip, menjerembabkan, dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi. © Hak cipta dilindungi Undang-undang.

ISSN 0301-6269

Harry Wibowo	2	TOPIK KITA
Umar Juoro	3	Kembali ke Roma
M Zulfan Tadjoeddin	16	Industrialisasi Substitusi Impor hingga Industri 4.0
Diatya Widya Permata Yasih	28	Keniscayaan Reindustrialisasi Indonesia
Fachru Nofrian Bakarudin	44	Industri 4.0, Ekonomi Gig, dan Prekaritas di Indonesia
Aswin Rifai	60	Industrialisasi Jangka Panjang yang Mengabaikan Sektor
Tulus Tambunan	76	Efektivitas Skema Kemitraan Publik-Swasta
Agus P Sari	96	Kontribusi Kewirausahaan dalam Industrialisasi
Andri BS Sudibyo	112	Sirkularitas Melawan Krisis Iklim
		Strategi Industri Maritim 2045
Nezar Patria	40	ESAI
		Narasi dan Politik Kerumunan
Saswinadi Sasmojo	124	DIALOG
		Negara Bahari: Menimbang Teknologi dan Memedulikan Riset
Rahadi T Wiratama	135	SURVEI
		Ringkasan Angket Pembaca <i>Prisma</i>
Tauhid Ahmad	139	LAPORAN KHUSUS
		Krakatau Steel Menghadapi Tantangan Global
Edy Burmansyah	150	ARTIKEL
Riza Imaduddin Abdali	167	Mengukur Kinerja Anggaran dan Utang Pemerintah
		Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia
Bosman Batubara	181	TESIS
		Banjir Jakarta dan Urbanisasi (Pasca-) Orde Baru
Shiskha Prabawaningtyas	193	TINJAUAN BUKU
Fahmi Panimbang	201	Deklarasi Djuanda: Dekolonialisasi dan Evolusi Identitas
	209	Menyingkap Penopang Kapitalisme Tersembunyi
		PARA PENULIS
		Vol. 41, No. 3, 2022: <i>Islam & Perubahan Global</i>
		Vol. 41, No. 4, 2022: <i>100 Tahun Soedjatmoko</i>

Gambar Cover: Yayah Yatmaha

Pendiri: Ismid Hadad, Nono Anwar Makarim • **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Harry Wibowo **Redaktur Senior:** Ismid Hadad, Vedi R Hadiz • **Dewan Redaksi:** Airlangga Pribadi Kusman, Azyumardi Azra, Inaya Rakhmani, Kamala Chandrakirana, Nezar Patria, Sumit Mandaf (Malaysia), Taufik Abdullah • **Redaktur Pelaksana:** E Dwi Arya Wisesa • **Redaktur Ekonomi:** Fachru Nofrian Bakarudin • **Redaktur:** Rahadi Teguh Wiratama • **Produksi:** Arief Mudi Handoko

Alamat: Jl. Pangkalan Jati No. 71, Cinere, Depok 16513, Indonesia. Telp/Faks: (6221) 2765 4031
Email: prisma@prismajurnal.com; prisma.redaksi@gmail.com; prismaredaksi@yahoo.com; Website: www.prismajurnal.com
Pemesanan Langsung: 0811 8845 741



BUKU

Deklarasi Djuanda: Dekolonialisasi dan Evolusi Identitas Teritorial Negara Maritim Indonesia



Judul: *Deklarasi Djuanda: Makna dan Implikasinya dalam Berteknologi dan Berindustri*
Penulis: Arini Tathagti, Lilly S Wasitova, Cara Mariko, dan Saswinadi Sasmojo
Penerbit: Yayasan Ikatan Alumni Teknik Kimia (IATK)-Institut Teknologi Bandung (ITB), Cetakan ke-2, Desember 2020
Tebal: xxv + 271 halaman
ISBN: 978-602-50344-3-5

Pada pertengahan Juni 2022, saat kali pertama dikontak dan diminta oleh redaksi Jurnal *Prisma* mengulas isi buku yang ditulis oleh empat orang alumni Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung, tanpa berpikir panjang saya menyatakan sanggup karena ini memberi kesempatan kepada saya untuk membaca dan menangkap isi buku yang menarik dan penting ini. Satu semangat dengan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009 Hassan Wirajuda dalam bagian Pengantar, saya mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran buku ini dalam ruang produksi atau reproduksi pengetahuan tentang narasi Deklarasi Djuanda, termasuk wacana yang berkembang terkait makna dan implikasinya di tengah minimnya referensi dan riset akademik tentang Deklarasi Djuanda.

Sejak pengakuan dunia internasional atas prinsip "*archipelagic state*" atau negara kepulauan yang merupakan esensi dari Deklarasi Djuanda melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Seas/UNCLOS*) tahun 1982, diskursus mengenai Deklarasi Djuanda sebagai orientasi dan rujukan dalam kebijakan pembangunan nasional cenderung terpinggirkan bahkan terlupakan. Salah satu dari sekian banyak tinjauan kritis yang muncul dalam konteks ruang dan waktu kekinian adalah, "Mengapa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah teritorial laut sangat luas tidak memiliki postur kekuatan militer angkatan laut dan penjaga pantai (*coast guard*) yang tangguh dan disegani?" Buku ini setidaknya menawarkan narasi dan pemahaman

BUKU

lebih atau bahkan kesadaran tentang evolusi Indonesia menuju negara maritim, termasuk diskursus tentang Indo-Pasifik yang mendominasi wacana publik belakangan ini.

Robert Cribb dan Michele Ford, misalnya, mengingatkan bahwa Indonesia sesungguhnya bukan sebuah negara kepulauan pada saat (awal) Proklamasi Kemerdekaan 1945.¹ Sebaliknya, wilayah kedaulatan Indonesia telah berevolusi sedemikian rupa dalam ruang dan waktu dengan mengalami perluasan atau pengurangan wilayah dan hak berdaulat dalam perjalanan menuju negara maritim yang ideal. Selain perluasan wilayah kedaulatan Indonesia di laut pasca-Deklarasi Djuanda 1957, perluasan dan pengurangan wilayah di laut saat Timor Timur dijadikan provinsi ke-27 pada 1976, pasca-Perjanjian New York tentang Irian Barat tahun 1962, pasca-Keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tentang status Pulau Sipadan dan Ligitan, serta pasca-Referendum Timor Timur pada 1999 dan berdirinya negara Timor Leste pada 2002. Pengakuan internasional atas prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Deklarasi Djuanda berkaitan erat dengan perjuangan diplomatik Indonesia sejak akhir 1957 hingga 1982 dalam menghasilkan kesepakatan antarbangsa yang mengubah secara mendasar tatanan hukum laut internasional.

Di sisi lain, pengidentifikasian strategi dan pilihan kebijakan nasional dalam “berteknologi dan berindustri” merupakan kunci utama bagi kekuatan dan daya saing Indonesia di tingkat global. Yang dimaksud “berteknologi dan berindustri” dalam buku ini adalah sekumpulan program kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dengan tujuan menyediakan segala kebutuhan bagi terlaksananya tata-kehidupan yang sejahtera, makmur, aman, dan damai, serta memiliki kemampuan untuk berkembang dan menyingkirkan ancaman dan gangguan pihak lain terhadap keamanan dan kedamaian (hal. 252). Catatan penting lainnya dalam diskursus itu adalah terjemahan kata “*archipelagic*” yang secara epistemologi diserap dari bahasa Yu-

¹ Robert Cribb dan Michele Ford, *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic States*. (Singapore: ISEAS, 2009), hal. 1.

nani, *arch* (utama, besar) dan *pelagos* (laut). Dengan demikian, menurut sejarawan Adrian B Lapien,² *archipelagic state* harus diartikan sebagai negara laut utama yang ditaburi pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut. Namun, baik Undang-Undang Dasar 1945 (amendemen) maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara masih menggunakan terjemahan kata “Negara Kepulauan.”

Pendekatan dan Struktur Isi Buku

Ditulis kali pertama pada 2019 dalam rangka merayakan Deklarasi Djuanda ke-62, buku yang tersusun dalam tiga bagian ini bertujuan, “... menggugah dan memotivasi masyarakat teknologi Indonesia—mahasiswa bidang ilmu Teknik maupun mereka yang berprofesi di bidang teknologi—untuk memahami makna Deklarasi Djuanda dan menggagas konsep, doktrin, pengembangan, serta praktik berteknologi dan berindustri di wilayah yang terkonfigurasi sebagai wilayah kepulauan—yang didukung sejumlah sistem teknologi strategis (*strategic enabling technology and system*)—dalam menegakkan kedaulatan Indonesia atas wilayah kekuasaannya yang mempunyai konfigurasi sebagai suatu ‘*archipelago*’ (hal. xv).”

Motivasi dan semangat para penulis adalah merepresentasikan kegelisahan dan keprihatinan atas minimnya literasi tentang Deklarasi Djuanda, baik secara umum maupun secara khusus di kalangan epistemik profesi. Minimnya literasi itu, sebagaimana diakui secara terbuka oleh empat penulis buku ini, berdampak pada soal pemahaman dasar termasuk produk kebijakan negara dalam praktik berteknologi dan berindustri. Secara keseluruhan, paparan atas resensi buku ini berfokus

² Adrian B Lapien *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hal. 2. Lihat juga, Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Negara Bahari, Negara Laut Utama yang Ditaburi Pulau-pulau”, dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/negara-bahari-negara-kepulauan/>

pada pendekatan penulisan, pengidentifikasian tema secara kritis, serta catatan tambahan tentang Deklarasi Djuanda, termasuk identifikasi mengenai agenda riset lanjutan.

Penerbitan buku ini juga dimaksudkan sebagai "literasi mengenai Deklarasi Djuanda" sekaligus "untuk mengingatkan dan memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang pernyataan batasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Sidang Dewan Menteri Kabinet Karya tanggal 13 Desember 1957, yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda (hal. xiv)." Pencetusan Deklarasi Djuanda pada 1957 dan pelbagai kebijakan yang mengikutinya merupakan momen sangat penting dalam membentuk wilayah kedaulatan NKRI. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari atau bahkan belum pernah mendengar peristiwa itu, apalagi memahami makna dan implikasi Deklarasi Djuanda yang sangat menentukan arah dan gerak perjalanan negara-bangsa Indonesia. Begitu pula mereka yang bergelut di bidang teknologi. Sebagian besar di antara mereka tidak banyak menaruh perhatian pada Deklarasi Djuanda karena menganggap ini merupakan isu berkait hubungan internasional, diplomasi, atau hukum internasional.

Menurut Profesor Saswinadi Sasmojo, salah satu penulis buku ini, konfigurasi wilayah Indonesia sebagai gugus kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menuntut dasar pola pandang dan pola pikir tersendiri dalam mengembangkan sains dan teknologi dan dalam pemfungsian teknologi dalam berindustri. Dalam banyak segi, pola pandang dan pola pikir tersebut berbeda dari yang lazim diterapkan negara-negara yang telah maju dalam berteknologi dan berindustri, yang lebih banyak mempratikkan solusi-solusi terhadap persoalan dengan medan yang secara geografik terkonfigurasi sebagai daratan kontinental. Sistem yang dibangun cenderung besar dan terpusat serta ditopang sistem infrastruktur dan logistik yang juga berorientasi pada wilayah yang terkonfigurasi sebagai daratan kontinental. Namun, dalam perumusan kebijakan berteknologi dan berindustri yang diberlakukan di Indonesia belum secara spesifik dan eksplisit berorientasi pada telaah menyeluruh bagi pembangunan di negara kepulauan seperti Indonesia. Bahkan,

"konsep dan doktrin dalam berteknologi dan berindustri pada umumnya tidak dilandasi pemikiran dan pandangan bahwa wilayah Indonesia terkonfigurasi sebagai *archipelagic state* yang memiliki 16.056 pulau dan dikelilingi oleh '*archipelagic water*' dengan luas mencapai 2/3 total luas wilayah keseluruhan (hal. xiii)."

Buku ini terbagi menjadi empat bagian dengan menggunakan pendekatan historis melalui paparan kronologis. Bagian pertama bertajuk Negara Kepulauan Nusantara "memperkenalkan latar belakang, sejarah, ketentuan-ketentuan yang lahir dari Deklarasi Djuanda, dampak deklarasi ini, dan pesan yang terungkap dari Deklarasi Djuanda." Sementara itu, bagian kedua bertajuk Peta Masalah dalam Menegakkan Kedaulatan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia "mengungkapkan masalah yang muncul dalam menegakkan kedaulatan di wilayah negara kepulauan Indonesia." Bagian ketiga dengan judul Keberlanjutan Sumber Daya dan Masalah Lingkungan Laut "mengulas sumber daya laut dan segi-segi penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ini serta aspek-aspek lingkungan laut yang perlu diperhatikan", sedangkan bagian keempat dengan judul Implikasi dalam Berteknologi dan Berindustri "menggariskan dukungan sistem teknologi strategis dan konsep berteknologi dan berindustri yang disarankan untuk dikembangkan dan diterapkan agar sesuai dengan konfigurasi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan (hal. xiii-xiv)."

Dengan gaya populer, Bagian Pertama dipaparkan secara kronologis dan ringkas, yang dibagi lagi menjadi tiga bab, yakni "Nusantara di Masa Lampau", khususnya cerita tentang kekuatan dan kekuasaan dua kerajaan maritim, Sriwijaya dan Majapahit, termasuk tradisi masyarakat maritim khususnya sebagai bangsa, bahasa, dan teknologi di bidang perkapalan. Bab berikutnya bertajuk "Wilayah Indonesia Sebelum 1957" khusus mengupas tentang kedatangan, bercokolnya, dan praktik monopoli *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC); dan dari kolonialisasi negara Hindia-Belanda pasca-bangkrutnya VOC dan Perang Napoleon hingga perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bab tiga

dari Bagian Pertama dengan tajuk "Perjalanan Panjang Menuju Negara Kepulauan Indonesia," selain menampilkan sosok Djuanda Kartawidjaja dan Mochtar Kusumaatmaja, dua orang tokoh yang berperan penting sebagai pencetus dan perumus Deklarasi Djuanda, juga mengupas tentang proses dan kondisi yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia menyetujui rumusan Deklarasi Djuanda pada Sidang Dewan Menteri Kabinet Karya tanggal 13 Desember 1957. Buku ini juga menyebut Chaerul Saleh, salah seorang menteri dalam Kabinet Djuanda, yang sempat "menantang" dan mempertanyakan konsep Mochtar Kusumaatmadja dalam merumuskan prinsip negara kepulauan.³

Sementara itu, Bagian Kedua tentang "Peta Masalah dalam Menegakkan Kedaulatan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" disusun dalam tiga tema utama, yaitu menegakkan kedaulatan negara, khususnya landasan kebijakan tata kelola perbatasan termasuk penetapan kewajiban tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai bentuk *trade-off* dari pengakuan sebagai negara kepulauan melalui prinsip "*innocent passage*" dan pengaturan wilayah udara. Tema kedua di Bagian Kedua ini bertajuk peta masalah di dalam menegakkan kedaulatan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, "utamanya membutuhkan pengawasan wilayah NKRI yang terintegrasi untuk wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara... dan selalu waspada dalam menjaga dan mempertahankan wilayah perbatasan dari potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas nasional (hal. 117-118)."

Bab 6 yang merupakan Simpulan dari Bagian Kedua buku ini menegaskan bahwa, "bangsa Indonesia memperjuangkan kedaulatan negara dan wilayah Negara Kesatuan Republik, baik secara konfrontasi langsung maupun secara diplomasi di dunia internasional.... Salah satu tonggak sejarah dalam perjuangan mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia adalah dicituskannya

³ Lihat, M Mukthi, "Chaerul Saleh dan Laut Teritorial Indonesia", dalam <https://historia.id/politik/articles/chairul-saleh-dan-laut-teritorial-indonesia-DWqzM/page/4>.

Deklarasi Djuanda... perwujudan kehendak bangsa Indonesia yang memiliki konstelasi geografi negara kepulauan untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur... (hal. 155-156)." Bab Simpulan dari Bagian Kedua juga menekankan pentingnya kualitas diplomasi yang andal dan bersifat menyeluruh, di samping kekuatan bersenjata yang *mumpuni*, dalam menjamin kekuatan dan ketahanan nasional bagi upaya mempertahankan kedaulatan negara.

Narasi Bagian Ketiga tentang "Keberlanjutan Sumber Daya dan Masalah Lingkungan Laut" dipaparkan dalam empat tema. Fokus pertama adalah tentang "Wilayah Laut Indonesia," khususnya prinsip perlunya "penyesuaian pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang dilandasi oleh kesadaran ruang kelautan... untuk mengelola sumber daya alam laut Indonesia (hal. 163)." Fokus kedua tentang "Potensi Sumber Daya Alam Laut Indonesia" mengupas keberagaman sumber daya alam laut Indonesia berupa potensi perikanan, terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, tambang mineral, sumber daya energi, energi pasang surut, energi gelombang, dan energi perbedaan suhu lapisan laut. Bab 9 dari Bagian Ketiga berfokus "Permasalahan Sumber Daya Alam Laut Indonesia," khususnya tentang *overfishing*, polusi, perubahan iklim, dan pengaruh aktivitas manusia lainnya. Sementara itu, fokus keempat yang bertajuk "Cagar Budaya Bawah Laut Indonesia," khususnya tentang situs kapal karam di wilayah laut Indonesia. Menurut data, ada "sekitar 493 titik kapal karam di sepanjang perairan Indonesia yang mengandung benda muatan kapal tenggelam (BMKT).... Karena mengandung nilai budaya, historis, dan arkeologis, BMKT dapat dikategorikan sebagai cagar budaya bawah laut (hal. 206)."

Bagian Keempat atau bagian terakhir dari buku ini disusun dalam lima bab. Tema pertama adalah "Lingkup Program Berteknologi dan Berindustri," khususnya "berteknologi dan berindustri untuk mendukung upaya pengembangan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bangsa; untuk mendukung upaya pembinaan dan pengembangan budaya dan kecerdasan dalam kehidupan bangsa; untuk penegakan kedaulatan atas wilayah dan penggunaan sumber daya alam; untuk mendukung

upaya perlindungan sumber daya alam; dan untuk mendukung upaya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kedaulatan negara (hal. 220-226).” Tema kedua adalah tentang “Berbagai Masalah Spesifik dalam Berteknologi dan Berindustri di Negara Berwilayah Kepulauan dan Terposisikan sebagai Nusantara,” khususnya konsekuensi dari konfigurasi wilayah berupa kepulauan yang berdampak pada kebutuhan energi, transportasi udara-laut, dan telekomunikasi; kebutuhan operasi lalu lintas di laut dan darat bagi pengamanan dan pertahanan (perangkat pengindera jarak jauh, perangkat pengindera di bawah permukaan laut tak berawak, perangkat patroli laut, perangkat penginderaan udara yang dipersenjatai, dan peluru kendali jarak pendek dengan presisi tinggi; serta pangkalan sistem produksi dan penginderaan di laut melalui pengembangan dan pemfungsian sarana teknologikal yang terpancang dan terapung di permukaan laut.

Tema ketiga dari Bagian Keempat buku ini adalah “Sistem Berteknologi dan Berindustri Strategik untuk Negara Kepulauan” terdiri atas tujuh sistem yang mencakup teknologi komunikasi dan transportasi antarpulau, *cyber security*, *distributed local resources based systems*, pengindustrian biologi, *biosecurity*, *process intensification*, serta teknologi pendukung sistem pengamanan dan pertahanan. Tema keempat adalah “Kebijakan Berteknologi dan Berindustri Negara Kepulauan,” khususnya dalam merumuskan kebijakan berteknologi dan berindustri negara kepulauan. Tema kelima adalah Rangkuman. Sebagaimana tersua, “dalam mengkaji implikasi dari konsep kewilayahan yang terumuskan dalam Deklarasi Djuanda terhadap pengembangan konsep berteknologi dan berindustri yang sesuai untuk diterapkan pada wilayah ... suatu *archipelago* yang melingkupi *archipelagic water*... telah dilakukan suatu kajian eksploratif terhadap persoalan-persoalan yang menuntut solusi bersifat teknologikal (hal. 263).” Sistem bersifat teknologikal ditujukan sebagai *strategic enabling technology and production systems* dengan kebutuhan enumerasi untuk *information and communication technology* (ICT), *cyber security*, radar, teknologi dan industri transportasi laut dan udara, teknologi

sistem tak berawak, sistem produksi bersifat *distributed and local resources based*, teknologi biota dan pengindustrian biologi, *biosecurity*, sistem penyimpanan energi, sistem produksi dilandasi teknologi *process intensification* bagi pengembangan ruang *compact and mobile production system*, dan roket jarak pendek.

Beberapa Catatan

Sebagai manifestasi “*material culture*” dalam bentuk dokumen tertulis, buku ini setidaknya memiliki beberapa catatan kritis, baik isi maupun teknis penyusunan narasi. Dari aspek isi, paparan buku ini setidaknya memperkuat dua pemahaman penting tentang dinamika pembentukan negara-bangsa dan kebutuhan akan perspektif yang bersifat holistik, komprehensif, dan kontekstual dalam memotret kondisi kekinian Indonesia. *Pertama*, sifat evolutif dari proses pembentukan negara-bangsa. Di satu sisi, proses pembentukan negara (*state building*) sering kali tidak berjalan seiring atau bersinergi dengan proses pembentukan bangsa (*nation-building*). Dinamika politik domestik dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat selalu termanifestasi dengan jatuh-bangunnya suatu pemerintahan, termasuk perbedaan karakter setiap rezim dalam memimpin dan menghasilkan kebijakan negara. Di sisi lain, pengaruh konstelasi politik global atas pilihan kebijakan negara, khususnya kebijakan luar negeri, membutuhkan sinergitas politik dalam negeri dalam upaya menjamin pemenuhan atas kepentingan nasional. Keengganan Belanda untuk membuka ruang dialog mengenai status Irian Barat atau Papua pasca-Konferensi Meja Bundar 1949, misalnya, bermuara pada pencanangan Deklarasi Djuanda pada 1957. Identitas teritorial melekat kuat pada keutuhan identitas nasional negara-bangsa Indonesia.

Kedua, kebutuhan akan pentingnya manifestasi atas memori institusi dan kolektif masyarakat dalam memahami dinamika pembangunan negara-bangsa Indonesia melalui perspektif secara holistik, komprehensif, dan kontekstual. Buku ini tidak mendiskusikan dan memaparkan definisi, istilah, serta konsep “berteknologi dan “berindustri” secara perinci, manifestasi memori institusi tentang

Dialok
Tersedia untuk
ruangan iklan

Harian Umum

Surat Kabar Kebangsaan Non-Partai

JANUARI 1957



Tugas nasional pokok:

Menjusun potensi' sekuat-kuantoja

Instruksi umum K. S. A. D. Kepada seluruh Pang. Militer G.K.S. berapat terus

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — K. S. A. D. (Korps Staf Angkatan Darat) telah mengeluarkan Instruksi Umum kepada seluruh Panglima Militer G.K.S. (Komando Militer Daerah) untuk terus mengorganisir dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing.

Instruksi ini menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga di daerah-daerah tersebut. Panglima Militer G.K.S. diminta untuk memimpin upaya-upaya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan semangat.

Kongres Rakyat

Memobilisasi tenaga rakyat Untuk menjalankan revolusi nasional

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — Kongres Rakyat yang diselenggarakan di Yogyakarta telah menghasilkan resolusi yang menekankan pentingnya mobilisasi tenaga rakyat untuk menjalankan revolusi nasional.

Resolusi Kongres Rakyat
"Resolusi yang dihasilkan oleh Kongres Rakyat yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 14 dan 15 Desember 1956. Resolusi ini menekankan pentingnya mobilisasi tenaga rakyat untuk menjalankan revolusi nasional."

TUTUP SUEZ

Bagi kapal' perang Belanda?

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — Penutupan Selat Suez oleh Mesir menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai nasib kapal-kapal perang Belanda yang sedang berlayar di sana.

Negara' Barat repot

Australia akan dekat Indonesia?

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — Negara-negara Barat sedang sibuk mempersiapkan diri untuk kemungkinan terjadinya perubahan hubungan dengan Australia dan Indonesia.

Pres. dihinggapi penjakit diplomatis?

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — Presiden Soekarno dihinggapi oleh para penjakit diplomatis yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Penentuan garis tegas

Tig. wilayah perairan RI.

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — Pemerintah telah menetapkan garis-garis tegas untuk wilayah perairan Indonesia.

Tjara Big 5 tjari untung

Mencharier kapal Italia

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — Lima negara besar (Big 5) sedang berusaha untuk mencharier kapal-kapal Italia.

Pres. dihinggapi penjakit diplomatis?

YOGYAKARTA, 15 Desember (Antara) — Presiden Soekarno dihinggapi oleh para penjakit diplomatis yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

proses dan keber
dalam logika ruang
yang menjadi negara
perspektifnya terha
sekuensinya terha
berteknologi dan
tektif masyarakat
sebagai penguata
sebagai penguata
maritim. Alfred M
kan enam kompo
sebuah negara at
yaitu lokasi geog
fisik, luas teritorik
orang/masyarakat
Memori institusi
menjadi kunci pe
an enam kompon
nesia sebagai ne
torial ditentukan
lokasi strategi ge
kedaulatan terito
tikan kualitas ya
pembangunan ya
an nasional dan
Dari aspek te
nai konsistensi
referensi. Dalam
terdapat ketidala
si sub-bab kesib
targ Negara K
gian Ketiga ter
Daya dan Mas
menyertakan b
Sementara itu,
Masalah dalam
Negara di Wil
blik Indonesia
Implikasi dalam
tri masing-ma
pulan atau Ran
buku ini mema
konteks meto
nis pemuatan
pengutipan di
Kutipan isi De
65-66, misalny

Alfred Mahan
Concepts of Sea
War College on
College Review

BUKU

BUKU

proses dan keberadaan Deklarasi Djuanda dalam logika ruang wilayah negara kepulauan yang menjadi kunci dalam pengembangan perspektif negara kepulauan, termasuk konskuensinya terhadap prioritas kebijakan "berteknologi dan berindustri." Memori kolektif masyarakat jati diri sebagai negara sebagai penguatan jati diri sebagai negara maritim. Alfred Mahan, misalnya, menegaskan enam komponen dasar kekuatan laut sebuah negara atau konsep negara maritim, yaitu lokasi geografis, konformasi (bentuk) fisik, luas teritorial, jumlah populasi, karakter orang/masyarakat, dan karakter pemerintah.⁴ Memori institusi dan kolektif masyarakat menjadi kunci pengelolaan dan pemberdayaan enam komponen dasar kekuatan laut Indonesia sebagai negara maritim. Identitas teritorial ditentukan oleh tiga aspek penting dari lokasi strategi geografis, bentuk fisik, dan luas kedaulatan teritorial Indonesia dalam memastikan kualitas pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek teknis terdapat catatan mengenai konsistensi struktur paparan dan teknik referensi. Dalam struktur paparan tematik terdapat ketidakseragaman, khususnya fungsi sub-bab kesimpulan. Bagian Pertama tentang Negara Kepulauan Nusantara dan Bagian Ketiga tentang Keberlanjutan Sumber Daya dan Masalah Lingkungan Laut tidak menyertakan bab Simpulan atau Rangkuman. Sementara itu, Bagian Kedua tentang Peta Masalah dalam Menegakkan Kedaulatan Negara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bagian Keempat tentang Implikasi dalam Berteknologi dan Berindustri masing-masing menyertakan bab Simpulan atau Rangkuman. Di samping itu, jika buku ini memakai pendekatan historis dalam konteks metode riset, sepatutnya aspek teknis pemuatan sumber referensi dan cara pengutipan dilakukan dengan lebih cermat. Kutipan isi Deklarasi Djuanda pada halaman 65-66, misalnya, selain tidak mencantumkan

sumber referensi juga tidak mengikuti kaidah pengutipan dalam dunia akademis secara umum. Terlampir adalah sebuah contoh sumber primer terkait isi Deklarasi Djuanda yang saya temukan dan gunakan untuk keperluan riset disertasi sepanjang tahun 2013-2015.

Agenda Riset Lanjutan

Sebagaimana diuraikan dalam buku ini, "dalam Sidang Kabinet Karya pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir Djuanda Kartawidjaja yang memimpin sidang kabinet menerbitkan deklarasi mengenai negara Republik Indonesia yang berbasis 'archipelagic state principle' dan menyatakan bahwa laut Indonesia, termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI... Isi dari Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam *Territorial Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* sudah tidak sesuai karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorial masing-masing; batas laut wilayah teritorial Indonesia menjadi 12 mil laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia saat air laut surut (hal. 65-67)."

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja memberikan arti tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan Nusantara sebagai satu kesatuan. Hal yang penting dari deklarasi itu adalah memberikan semacam sumbangan pandangan terhadap dunia internasional bahwa negara yang terdiri dari banyak pulau dan perairan yang daulat penuh atas pulau dan perairan yang ada di antara dan sekitarnya. Sebagaimana ditegaskan Hasjim Djalal, diplomat Indonesia *cum* ahli hukum laut internasional, laut di Nusantara selama masa VOC berfungsi sebagai alat pemisah dan pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah masa Kemerdekaan, muncul pemikiran utama bangsa Indonesia bagaimana mencari konsepsi baru

⁴ Alfred Mahan dalam H Kammer Manship, "Mahan's Concepts of Sea Power; A lecture delivered at the Naval War College on 23 September 1963", dalam *Naval War College Review* Vol. 16, No. 5, 1994, hal. 20.

di bidang hukum laut dan kelautan yang menjamin dan mengembangkan kesatuan bangsa Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, lahir Deklarasi Djuanda yang mengusung konsep *Wawasan Nusantara*. Dengan konsep itu, laut di antara dan sekeliling pulau Indonesia tidak dianggap sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, tetapi harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa.⁵ Deklarasi Djuanda diumumkan secara resmi ke publik melalui surat-surat kabar tiga hari kemudian, Senin, 16 Desember 1957. Keesokan harinya, Selasa, 17 Desember 1957, Presiden Soekarno mengumumkan kondisi negara dalam Situasi Perang, setelah sejak 14 Maret 1957 negara dinyatakan berada dalam Status Darurat.⁶

Saya mengapresiasi buku ini sebagai sebuah produk *material culture* berupa narasi tentang Deklarasi Djuanda, termasuk pandangan dan analisis tentang makna dan implikasi Deklarasi Djuanda dalam berteknologi dan berindustri sebagaimana tersurat dalam sub-judul buku ini. Dengan kata lain, buku ini merupakan wujud produksi sekaligus (re-) produksi pengetahuan tentang Deklarasi Djuanda melalui perspektif historiografi non-negara. Walaupun ketiga penulis, yakni Arini Tathagati, Cara Mariko, dan Prof Saswinadi berlatar pendidikan Teknik Kimia, serta Lily S Wasitova berlatar pendidikan Teknik Penerbangan,

⁵Hasjim Djalal, "Deklarasi Djuanda dalam Perspektif Sejarah", dalam *50 Tahun Deklarasi Djuanda, Sejarah Kewilayahan Indonesia*. Kumpulan Makalah Direktorat Geografi Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007, hal. 4.

⁶Shishka Prabawaningtyas. "Maritime Territoriality and Hybrid Space: Transborder Identities in the Arafura and Timor Maritime Zone". *Disertasi PhD*, Humboldt University t zu Berlin, 2015, hal. 55.

buku ini banyak memakai perspektif historis dalam memaparkan pokok-pokok pemikiran, termasuk pandangan dan analisis masing-masing penulisnya. Metode tersebut dapat merepresentasikan tumbuh berkembangnya semangat pendekatan transdisipliner dalam konteks produksi dan (re-)produksi pengetahuan di Indonesia.

Bagaimanapun juga, tulisan-tulisan dalam buku ini diharapkan mampu menggerakkan minat para calon peneliti untuk menyusun dan melaksanakan agenda riset lanjutan, baik berfokus pada aspek perjalanan sejarah Deklarasi Djuanda dengan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder yang belum pernah terjamah maupun berfokus pada makna dan implikasi Deklarasi Djuanda terhadap orientasi kebijakan luar dan dalam negeri Indonesia sebagai sebuah negara maritim, yang dalam bahasa sejarawan Adrian J Lapien disebut sebagai negara bahari.

Secara keseluruhan, buku ini layak dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk mengetahui lebih jauh dan memahami arti penting Deklarasi Djuanda bagi proses pembentukan negara-bangsa Indonesia, yang tetap relevan dan dibutuhkan oleh pembangunan nasional dalam menghadapi turbulensi dan pergeseran geopolitik global di tengah pusaran dunia yang saling bergantung dan berkompetisi di bidang teknologi digital. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu meredam dominasi perspektif "*taken for granted*" atau pemahaman apa adanya di luar konteks wujud dan bentuk negara bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kini, khususnya mengenai wilayah atau kedaulatan teritori Indonesia. ●

Shishka Prabawaningtyas

